BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat

PERUMTEL adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa Telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Pada awalnya bernama "POST EN TELEGRAAFDIENST" yang didirikan pada tahun 1884 dengan Staatblad no 52, kemudian pada tahun 1906 dirubah menjadi "POST, TELEGRAAF EN TELEFOONDIENST" (PTT) dengan Staatsblad no. 395 dan semenjak itu disebut PTT-Dients. Tahun 1931 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W.

Selanjutnya pada tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 19 tahun 1960, tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara (PN) dengan PERPU no. 240 tahun 1961 berubah menjadi PN POS dan TELEKOMUNIKASI. Lapangan usaha PN POS dan TELEKOMUNIKASI ternyata berkembang dengan pesat, maka pada tahun 1965 Pemerintah mengadakan peninjauan kembali. Hasilnya berdasarkan Peratuaran Pemerintah (PP) no. 29 dan 30 tahun 1965 terjadi pemecahan menjadi : P.N.POS dan TELEKOMUNIKASI.

Selanjutnya mulai tanggal 28 April 1970 berdasarkan S.K. Mentri Perhubungan no.129/U/1970 PN TELEKOMUNIKASI berubah menjadi PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI yang disingkat dengan PERUMTEL. Keberadaan PERUMTEL dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah

no 36 tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan luar negeri.

Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan membeli seluruh saham PT INDOSAT sebuah perusahaan swasta yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah statusnya menjadi BUMN berbentuk PERSERO. Pernyataan modal negara Republik Indonesia dalam saham PT.INDOSAT tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no 52 tahun 1980.

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, maka dengan Peraturan Pemerintah no. 53 tahun 1980 diadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 22 tahun 1974, yakni dengan menetapkan PERUMTEL sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam negri dan PT INDOSAT sebagai badan usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan telekominikasi untuk umum internasional.

Mengikat perkembangan demikian pesat ditambah dengan pola manajemen yang lebih terbuka, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah no.25 tahun 1991 tanggal 1 Mei 1991 menetapkan Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).Peralihan bentuk perusahaan tersebut ditandai dengan penanda tanganan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia oleh Notaris Imas Fatimah,SH bersama-sama dengan Menparpostel Soesilo Sudarman yang bertindak selaku kuasa dari Mentri Keuangan sebagai pemegang

saham, hari Selasa tanggal 24 September 1991 jam 09.30 WIB di Depparpostel, Jl. Kebon Sirih 36 Jakarta Pusat.

Selanjutnya, tahun 1995 Penawaran Umum perdana saham TELKOM (*Initial Public Offering* / IPO) dilakukan pada tanggal 14 November 1995. sejak itu saham TELKOM tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (*Public Offering Without Listing*/POWL) di Tokyo Stock Exchange.

Tahun 1996 Kerja sama Operasi (KSO) mulai diimplementasikan pada 1 Januari 1996 di wilayah Divisi Regional I Sumatra dengan mitra PT Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo); Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten dengan mitra PT Aria West International (AriaWest); Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan mitra PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI); Divisi Regional VI Kalimantan dengan mitra PT Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra); dan Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia dengan mitra PT Bukaka Singtel.

Tahun 1999 Undang-undang nomor 36 tahun 1999, tentang penghapusan monopoli penyelenggaraan telekomunikasi. Dan tahun 2001 TELKOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT INDOSAT sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia, yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara TELKOM dengan INDOSAT. Dengan transaksi ini, TELKOM menguasai 72,72% saham Telkomsel. TELKOM membeli 90,32% saham Dayamitra dan

mengkonsolidasikan laporan keuangan Dayamitra ke dalam laporan keuangan TELKOM.

Selanjutnya, tahun 2002 TELKOM membeli seluruh saham Pramindo melalui 3 tahap, yaitu 30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual-beli pada tanggal 15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003 dan sisa 55% saham pada tanggal 31 Desember 2004. TELKOM menjual 12,72% saham Telkomsel kepada Singapore Telecom, dan dengan demikian TELKOM memiliki 65% saham Telkomsel. Sejak Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal.

Adapun visi dan misi yang menjadi arah tujuan bagi PT TELKOM dalam menjalankan usahanya, yaitu :

1. V I S I

   Berupaya untuk mewujudkan diri sebagai perusahaan INFOCOM papan atas dikawasan asia tenggara, yang selanjutnya akan berlanjut dikawasan asia pasifik.

2. M I S I

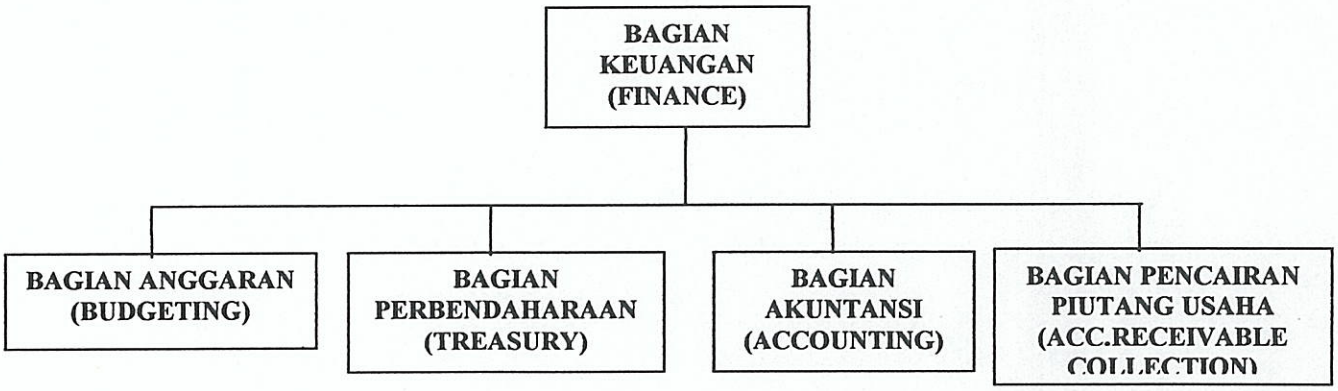
   a. Memberikan layanan "one stop" servis dengan kualitas prima dan harga kompetitif.
   b. Mengelola usaha melalui cara terbaik dan SDM yang unggul.
   c. Teknologi yang kompetitif dan "Business partner" yang sinergi.

2.2 Struktur Organisasi

Adapun fungsi hubungan wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam struktur organisasi PT TELKOM DIVRE III Bagian Keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

BAGIAN KEUANGAN DIVRE III



Gambar 2.1 Struktur organisasi bagian keuangan Divre III

2.3 Deskripsi Jabatan

Dibawah ini akan diuraikan deskripsi jabatan dari Bidang Keuangan Bagian Anggaran pada PT TELKOM DIVRE III :

1. Manajer Anggaran

Tugas dari Manajer Anggaran, antara lain :

a. Mengkoordinasikan penyusunan dan revisi anggaran.

b. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran.

c. Melakukan evaluasi terhadap performansi keuangan berdasarkan pelaksanaan anggaran.

d. Penyusunan laporan analisis pelaksanaan anggaran.

Wewenang dari Manajer Anggaran, antara lain :

a. Menyajikan peringatan dini serta merekomendasikan langkah-langkah pengamanan pendapatan / DTR kepada manajer keuangan.

b. Merekomendasikan kebijakan dalam proses penyusunan dan revisi anggarn (termasuk penetapan software, asumsi, prosedur, dan format yang digunakan).

c. Merekomendasikan cara-cara atau metode pelaksanaan evaluasi anggaran yang paling efektif dan efisien.

d. Merekomendasikan format, layout dan sistematika laporan anggaran yang informatif dan berbobot.

2. Officer 1 Anggaran Beban

Tugas dari Officer 1 Anggaran Beban, antara lain:

a. Menginput data anggaran beban ke model realisasi.

b. Menindaklanjuti permohonan redistribusi / realokasi / ABT anggaran beban.

c. Input realisasi beban dari SAP.

d. Membantu analisa/evaluasi anggaran beban.

e. Penyusunan RKAP, antara lain :

- Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan RKAP.

- Membuat format / model isian untuk penyusunana RKAP.
- Memberi asistensi penyusunan anggaran bidang beban.
- Menangani software penyusunan anggaran beban.
- Menginput perubahan data anggaran beban yang dikoreksi.

f. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk rapat manajer.

g. Melayani permintaan data dari unit kerja lain yang memerlukan.

h. Membantu bidang pendapatan, investasi dan lain-lain yang perlu diselesaikan segera.

Wewenang dari Officer 1 Anggaran Beban, antara lain:

a. Merekomendasi alokasi/realokasi anggaran beban untuk pencapaian hasil yang layak dalam mendukung tercapainya kinerja keuangan yang sehat.

b. Memperoleh akses data keuangan/non keuangan perusahaan untuk konsumsi evaluasi realisasi Anggaran beban pada periode bulanan.

c. Menyusun dan menjabarkan petunjuk penyusunan RKAP bidang OPEX kedalam program program tahunan Manajemen.

d. Mengevaluasi usulan RKAP-OPEX Datel, Bidang, Unit dan Membuat Usulan RKAP-OPEX Divisi Ke Kantor Perusahaan.

e. Merekomendasi Revisi RKAP, usulan ABT, Relokasi dan Redistribusi Anggaran.

f. Merekomendasi tindakan bisnis atas evaluasi Anggaran OPEX.

3. Officer 2 Anggaran Investasi

Tugas dari Officer 2 Anggaran Investasi, antara lain:

a. Bertanggung jawab atas penjabaran bisnis plan tahunan alokasi sumber dana CAPEX atas dasar bisnis plan 5 tahunan Divisi Regional III Jawa Barat.
b. Bertanggung jawab terhadap Penyusunan, Penetapan, dan Revisi RKAP - CAPEX Datel, Bidang, Unit kerja dilingkungan DIVRE III Jawa Barat.
c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan rencana dan pendistribusian anggaran CAPEX dari seluruh DATEL, melakukan analisa, rekomendasi untuk penetapan manajemen, advokasi analisa CAPEX untuk kelayakan investasi serta mengevaluasi pencapaian/realisasi anggaran investasi.
d. Bertanggung jawab terhadap Evaluasi Pengendalian pencapaian dan pengamanan RKAP - CAPEX DIVRE III Jawa Barat. Termasuk melakukan Analisa variant, pengelolaan realokasi, redistribusi anggaran CAPEX agar flexible untuk mendukung opersional.

Wewenang dari Officer 2 Anggaran investasi, antara lain :

a. Merekomendasi alokasi/realokasi anggaran CAPEX untuk pencapaian hasil investasi yang layak dalam mendukung tercapainya kinerja keuangan yang sehat.
b. Melakukan klarifikasi, rekomendasi, dan layanan asistensi advisory dukungan analisa kelayakan investasi (AKI) untuk meminimalisir resiko.
c. Memperoleh akses data keuangan/non keuangan perusahaan untuk konsumsi evaluasi realisasi Anggaran CAPEX pada periode bulanan.
d. Menyusun dan menjabarkan petunjuk penyusunan RKAP bidang CAPEX kedalam program program tahunan Manajemen.

e. Mengevaluasi usulan RKAP-CAPEX Datel, Bidang, Unit dan Membuat Usulan RKAP-CAPEX Divisi Ke Kantor Perusahaan.

f. Merekomendasi Revisi RKAP, usulan ABT, Relokasi dan Redistribusi Anggaran.

g. Merekomendasi tindakan bisnis atas evaluasi Anggaran CAPEX.

4. Officer 3 Anggaran

Tugas dari Officer 3 Anggaran, antara lain:

a. Melaksanakan verifikasi anggaran.

b. Mengelola kegiatan kesekretariatan Bagian Anggaran.

c. Menginput transakasi Keuangan ke SAP.

Wewenang dari Officer 3 Anggaran, antara lain :

a. Akses ke SAP sesuai otorisasi.

b. Menolak dan mengembalikan berkas tagihan yang tidak memenuhi persyaratan anggaran.

5. Petugas Anggaran

Tugas dari Petugas Anggaran, antara lain:

a. Melakukan verifikasi anggaran.

b. Membantu Manager Anggaran dalam menyusun anggaran biaya.

c. Membantu operasional anggaran.

Wewenang dari Petugas Anggaran, antara lain :

Menolak dan mengembalikan berkas tagihan yang tidak memenuhi persyaratan anggaran.



2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Dibawah ini akan dipaparkan pembahasan mengenai beberapa aspek kegiatan dalam PT TELKOM secara umum.

2.4.1 Kegiatan usaha

Bisnis utama TELKOM eksisting adalah : *Public Switch Telephone Network (PSTN)* yang meliputi : Telepon, Telex, Telegram, Telepon Umum (TELUM), *dan Intelligent Network (IN) ; Integrated Service Digital Network (ISDN) ; Multimedia (entertainment, teleservice internet) ; Network* (sirkit langganan & interkoneksi) ; dan substitusi PSTN *(PersonalCommunication System (PCS)) ; Personal Handyphone System (PHS) & Cordless).* Sesuai dengan CSS 2000-2004, maka mulai tahun 2001 TELKOM telah berkembang menjadi penyelenggara jasa INFOCOM dalam lima area bisnis (Phone – Mobile – View – Internet –Service : PMVIS).

Dalam hal jasa PSTN, TELKOM melayani telekomunikasi lokal dan sambungan langsung jarak jauh (long distance), sementara untuk sambungan langsung internasional dikelola oleh INDOSAT.

TELKOM menyelenggarakan operasi bisnisnya di seluruh propinsi di Indonesia melalui divisi-divisi, baik divisi utama (core) maupun divisi pendukung

(support). Secara singkat fungsi divisi-divisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Divisi utama (core)

a. Divisi Regional (DIVRE) adalah unit bisnis perusahaan yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran bisnis jasa telekomunikasi dan informasi melalui kegiatan unit-unit kerja di area geografisnya : DIVRE I : SUMATERA ; DIVRE II : JAKARTA ; DIVRE III : JAWA BARAT ; DIVRE IV : JAWA TENGAH ; DIVRE V : JAWA TIMUR ; DIVRE VI : KALIMANTAN ; DIVRE VII : KEPULAUAN INDONESIA TIMUR.

b. Divisi Network (DIVNET) adalah unit bisnis perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan jasa network jarak jauh melalui kegiatan unit-unit kerjanya yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri sesuai dengan jangkauannya.

c. Divisi Multimedia (DIVMEDIA) adalah unit bisnis perusahaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jasa nilai tambah multimedia dan penyediaan jaringan / infrastruktur multimedia.

2. Divisi pendukung (support)

a. Divisi Pelatihan (DIVLAT) adalah unit perusahaan yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pengusahaan jasa penyelenggaraan pelatihan teknologi, fungsi bisnis dan kepemimpinan di bidang telekomunikasi serta jasa-jasa lain yang berkaitan.

b. Divisi Sistem Informasi (DIVSISFO) adalah unit perusahaan yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pengusahaan jasa sistem

informasi tetapi tidak terbatas pada jaringan sistem multimedia OA (Office Automation), jasa pembangunan dan pemeliharaan system aplikasi (software house), pengelolaan sistem informasi manajemen dan jasa integrasi system informasi, dengan prioritas pelayanan kebutuhan perusahaan, unit-unit dibawahnya serta masyarakat umum.

c. Divisi Atelir (DIVAT) adalah unit perusahaan yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pengusahaan jasa atelir bagi alat-alat produksi divisi-divisi regional, divisi network dan pengguna-pengguna lain di luar perusahaan, serta jasa-jasa yang berkaitan dengan prioritas pemenuhan pelayanan kebutuhan internal perusahaan.

d. Divisi Riset Teknologi Informasi (DIVRISTI) adalah unit perusahaan yang bertanggung jawab mendukung perusahaan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi yang optimal, sesuai dengan kondisi Indonesia serta pengembangan dan implementasi sistem manajemen mutu.

e. Divisi Pembangunan (DIVPEM) adalah unit pengelola kegiatan perusahaan dalam bidang pelaksanaan pembangunan sarana telekomunikasi dan penunjang.

f. Divisi Properti (DIVPERTI) adalah unit pengelola kegiatan perusahaan di bidang pengusahaan properti terutama bagi divisi regional, divisi network dan divisi-divisi lainnya melalui optimalisasi asset-asset divisi properti.

2.4.2 Produk dan layanan

Dibawah ini disajikan tabel katalog produk dan layanan yang ditawarkan oleh PT TELKOM.

Tabel 2.1

Katalog Produk dan Layanan

PT TELKOM

No	Produk dan Layanan	
1	**Phone (P) Net**	a. Telepon Pelanggan b. Sambungan Pelanggan Jarak Jauh SPJJ c. Centrex d. Direct Inward Dialling /DID e. FWA - CDMA f. TelkomISDN g. TELKOM Teleconference h. Telkom SMS i. Telkom Vote j. Telkom Unicall k. Telkom Virtualnet l. Telkom Free m.Telkom Free Personal n. Telkom Premium o. Telkom Flexi
2	**Mobile (M) Net**	a kartu HALO b. TOP (Telkomsel On-line Payment) c. Mobile Banking d. simPATI e. TELKOMSEL Siaga
3	**View (V) Net**	a. Pay TV Cable b. Pay TV Satelit

4	**Inter (I) Net**	a. TELKOMNet Instan b. TELKOMNet ISDN c. TELKOMNet Prima d. TELKOMNet Astinet e. TELKOMNet ADSL f. TELKOMNet Turbo g. TELKOMNet Whole Sale (VPN Dial) h. TELKOM Web Kiostron i. TELKOM Web Plazatron j. Plasa.com k. i-Trust l. i-Manage m.i-Settle n. i- Deal o. i-Exchange p. HOTNet q. E-Public Service r. Internet Teleponi - TELKOMSave - TELKOMGlobal 017
5	**Service (S) Net**	a. TELKOM Intercarrier - Interkoneksi * Interkoneksi Jaringan Traffic Sensitive * Interkoneksi Jaringan Non Traffic Sensitive - Sewa Jaringan * Sewa Jaringan Traffic Sensitive * Sewa Jaringan Non Traffic Sensitive b. Panggilan Antar Penyelenggara (Interconnect Call) - Panggilan ke Selular - Panggilan ke Satelit

		- Panggilan ke Tetap Jarak Jauh - Panggilan ke Tetap Internasional c. TELKOMLink-ADSL d. TELKOMLink-Wireless e. TELKOMLink>2Mbps f. TELKOMSatellite g. TELKOMTelecast - Network TV Digital - Teleprogram - TV Up Link

Sumber : Intranet PT TELKOM DIVRE III